

Yth.

Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /SEOJK.05/2020

TENTANG

RENCANA BISNIS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional.

3. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh LPEI.
4. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya.
5. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.
7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha LPEI dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
8. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9. Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
10. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direktur Eksekutif mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
11. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Direktur mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis LPEI paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi;

- 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana permodalan;
 - 4) rencana pendanaan;
 - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan
 - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi;
- e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
2. Cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus meliputi juga Rencana Bisnis khusus untuk kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.
 3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar Rencana Bisnis dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh LPEI dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. indikator keuangan utama; dan
 - d. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 4. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan paling sedikit mengenai:
 - a. gambaran umum kondisi ekonomi periode Rencana Bisnis sebelumnya;

- b. perbandingan antara Rencana Bisnis periode sebelumnya dengan realisasinya;
 - c. pencapaian kinerja Rencana Bisnis periode sebelumnya, antara lain:
 - 1) kinerja keuangan; dan
 - 2) kinerja nonkeuangan,
 - d. pelaksanaan penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI periode Rencana Bisnis sebelumnya;
 - e. kendala dan permasalahan yang dihadapi periode sebelumnya; dan
 - f. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
6. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 5 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
- a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai LPEI dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan LPEI dalam menghadapi tantangan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) analisis posisi LPEI dalam menghadapi tantangan bisnis, termasuk informasi mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional LPEI;
 - 2) arah kebijakan LPEI, meliputi informasi umum kebijakan LPEI yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha LPEI pada waktu yang akan datang; dan
 - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi mengenai:
 - a) langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan usaha LPEI yang telah ditetapkan;

- b) penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi; dan
 - c) strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.
8. Dalam menyusun analisis posisi LPEI dalam menghadapi tantangan bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c angka 1), LPEI dapat menggunakan metode analisis perencanaan strategis yang relevan.
9. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha LPEI yang paling sedikit meliputi:
- a. rencana kegiatan usaha Pembiayaan;
 - b. rencana kegiatan usaha Penjaminan; dan
 - c. rencana kegiatan usaha Asuransi.
11. Rencana kegiatan usaha Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a terdiri dari:
- a. Pembiayaan modal kerja; dan/atau
 - b. Pembiayaan investasi.
12. Rencana kegiatan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b terdiri dari:
- a. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
 - b. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
 - c. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau

- d. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
13. Rencana kegiatan usaha Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c terdiri dari:
- a. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
 - b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
 - c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.
14. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
- a. rencana produk dan aktivitas baru; dan
 - b. rencana pengembangan pelayanan.
16. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
17. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi informasi mengenai proyeksi permodalan.
18. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 17 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi rencana pendanaan berdasarkan:
- a. sumber pendanaan; dan
 - b. mata uang.

20. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
21. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembukaan kantor wilayah dan/atau kantor pemasaran;
 - b. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor wilayah, dan/atau kantor pemasaran; dan
 - c. rencana penutupan kantor wilayah dan/atau kantor pemasaran.
22. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 21 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
23. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
 - 3) rencana pembentukan komite,
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain;
 - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia
 - a) rencana rekrutmen;
 - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
 - d) rencana penggunaan tenaga kontrak,
 - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
 - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan

- b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan
 - a. rencana pengembangan teknologi informasi yang merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti LPEI;
 - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan/atau
 - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko LPEI.
24. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
25. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
 - 1) asumsi makro; dan
 - 2) asumsi mikro.
 - b. Informasi mengenai kondisi keuangan LPEI, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
 - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif;
 - 3) proyeksi laporan arus kas; dan
 - 4) rekening administratif.
26. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 25 disusun sesuai dengan format

10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

27. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

28. Rencana Bisnis yang memuat:

- a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c;
- b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10;
- c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 17;
- d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 19;
- e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 25; dan
- f. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 27,

disajikan:

- 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
- 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara triwulanan; dan
- 4) dalam juta rupiah.

29. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha LPEI, namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, antara lain:

- a. rencana aksi keuangan berkelanjutan;
- b. rencana penghapusbukuan piutang;
- c. rencana penugasan khusus dari pemerintah kepada LPEI;
- d. rencana penempatan dana; dan
- e. penerapan manajemen risiko.

30. Rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf a disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
31. Rencana penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf b disusun sesuai format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran jasa keuangan ini.
32. Rencana penugasan khusus dari pemerintah kepada LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf c, paling sedikit memuat:
 - 1) sumber dana penugasan khusus;
 - 2) rencana penggunaan dana;
 - 3) tujuan penugasan khusus;
 - 4) manfaat penugasan khusus; dan
 - 5) proyeksi keuangan.
33. Rencana penugasan khusus dari pemerintah kepada LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 32 disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
34. Rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf d disusun sesuai format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran jasa keuangan ini.
35. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf e paling sedikit memuat:
 - a. faktor-faktor risiko;
 - b. proses manajemen risiko;
 - c. profil risiko; dan
 - d. penerapan tata kelola yang baik.
36. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 35 disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

37. Uraian mengenai cakupan rencana bisnis yang meliputi:

- a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
- b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
- c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
- d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4)
- e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
- f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6);
- g. rencana penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud dalam angka 29 huruf b;
- h. rencana penugasan khusus pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 29 huruf c; dan
- i. rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam angka 29 huruf d.

memuat juga uraian mengenai:

- 1) alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
- 2) strategi LPEI untuk merealisasikan rencana dimaksud.

38. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh LPEI dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan LPEI.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:

- a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
 3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Direktur Eksekutif.
 4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi penilaian Dewan Direktur mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja LPEI; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja LPEI.
 6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
 7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Dewan Direktur.

8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. LPEI harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. LPEI wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian dokumen secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.

6. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p.

- 1) Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus; dan
 - 2) Direktur IKNB Syariah
- Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. LPEI dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Legislasi dan Informasi Hukum
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Rifki Ramadansyah

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /SEOJK.05/2020

TENTANG

RENCANA BISNIS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DAFTAR ISI

FORMAT RENCANA BISNIS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Format 1	: Ringkasan Eksekutif	3
Format 2	: Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya	6
Format 3	: Visi, Misi, dan Strategi Bisnis	7
Format 4	: Rencana Kegiatan Usaha LPEI	8
Format 5	: Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha	16
Format 6	: Rencana Permodalan	19
Format 7	: Rencana Pendanaan	21
Format 8	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi	26
Format 9	: Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi	27
Format 10	Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan	30
Format 11	: Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu	38
Format 12	: Rencana Penghapusbukuan Piutang	39
Format 13	: Rencana Penugasan Khusus dari Pemerintah Kepada LPEI	40
Format 14	: Rencana penempatan Dana	41
Format 15	: Penerapan Manajemen Risiko	42
Format 16	: Laporan Realisasi Rencana Bisnis	43
Format 17	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	44

Format 1 : Ringkasan Eksekutif

1. Rencana dan langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh LPEI
 - a) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) dst.
 - b) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) dst.

Keterangan:

Langkah-langkah strategis untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dijabarkan secara singkat.

2. Indikator kinerja utama

(diisi dengan uraian tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja yang meliputi perspektif keuangan, perspektif *stakeholder*, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan)

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Indikator keuangan utama

Review:

a. Tabel indikator keuangan utama

No.	Indikator Keuangan	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
			Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
1.	<i>Rasio Non Performing Financing (NPF)</i>						
	a) <i>Gross</i>						
	b) <i>Netto</i>						
2.	Rasio kecukupan modal (CAR)						
3.	<i>Financing to asset ratio</i>						
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>						
5.	Rentabilitas						
	a) <i>Return on Asset</i>						
	b) <i>Return on Equity</i>						
	c) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional						
6.	Rasio klaim						
	a) Asuransi						
	b) Penjaminan						
7.	Rasio Likuiditas (<i>Current Ratio</i>)						
8.	<i>Gearing Ratio</i>						

Keterangan

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun pertama posisi Rencana Bisnis.

b. Uraian mengenai kondisi keuangan LPEI

(diisi uraian mengenai kondisi keuangan LPEI beserta proyeksi yang tercermin dari indikator keuangan utama serta penjabaran secara singkat terkait kondisi keuangan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)

4. Uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun *)
1. ...
 2. ...
 3. dst.

Keterangan:

- *) antara lain meliputi total penyaluran pembiayaan, total plafon penjaminan, dan total pertanggungan asuransi termasuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, dll.

Format 2 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

<p>Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya</p> <p>a. Gambaran umum kondisi ekonomi periode Rencana Bisnis sebelumnya;</p> <p>b. Perbandingan antara Rencana Bisnis periode sebelumnya dengan realisasinya;</p> <p>c. Pencapaian kinerja Rencana Bisnis periode sebelumnya antara lain: 1) kinerja keuangan; 2) kinerja nonkeuangan;</p> <p>d. Pelaksanaan penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI periode Rencana Bisnis sebelumnya;</p> <p>e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi periode sebelumnya; dan</p> <p>f. Hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.</p>

Keterangan:

Termasuk penjabaran secara singkat terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Format 3 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

1. Visi

.....
.....

2. Misi

.....
.....

3. Strategi Bisnis*)

a. analisis posisi LPEI dalam menghadapi tantangan bisnis;

.....
.....

b. arah kebijakan LPEI

.....
.....

c. strategi pengembangan bisnis

.....
.....

Keterangan:

Termasuk penjabaran secara singkat terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Format 4 : Rencana Kegiatan Usaha LPEI

A. Rencana Kegiatan Usaha Pembiayaan

1. Tabel rencana kegiatan usaha Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Jumlah Debitur ²⁾	Aktual Sept X-1 ³⁾	Proyeksi ³⁾				
			Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
a. Pembiayaan Modal Kerja							
i. Kepada peminjam inti ¹⁾							
ii. Menurut sektor ekonomi							
- ...							
- dst.							
iii. Menurut lokasi							
- ...							
- dst.							
b. Pembiayaan Investasi							
i. Kepada peminjam inti ¹⁾							
ii. Menurut sektor ekonomi							
- ...							
- dst.							
iii. Menurut lokasi							
- ...							

Jenis Pembiayaan	Jumlah Debitur ²⁾	Aktual Sept X-1 ³⁾	Proyeksi ³⁾				
			Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
- dst							
Jumlah Total							
% Total Pembiayaan terhadap ekuitas							

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan

X tahun pertama posisi Rencana Bisnis

1) jumlah plafon Pembiayaan disajikan secara agregat terhadap jumlah debitur tertentu sesuai kebutuhan

2) jumlah debitur yang disajikan secara kumulatif

3) Plafon Pembiayaan

2. Alasan/pertimbangan dan strategi

a. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pembiayaan baik berdasarkan ukuran usaha, penugasan dan nonpenugasan pemerintah)

b. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Pembiayaan)

B. Rencana Kegiatan Usaha Penjaminan

1. Tabel rencana kegiatan usaha Penjaminan

Jenis Penjaminan	Jumlah Debitur ¹⁾	Aktual Sept X-1 ²⁾	Proyeksi ²⁾				
			Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
a. Penjaminan bagi Eksportir							
i. Menurut sektor ekonomi							
- ...							
- dst.							
ii. Menurut lokasi							
- ...							
- dst.							
b. Penjaminan bagi importir							
i. Menurut sektor ekonomi							
- ...							
- dst.							
i. Menurut lokasi							
- ...							
- dst.							

Jenis Penjaminan	Jumlah Debitur ¹⁾	Aktual Sept X-1 ²⁾	Proyeksi ²⁾				
			Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
c. Penjaminan bagi bank							
d. Penjaminan tender							
Jumlah Total							

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan

X tahun pertama posisi Rencana Bisnis

¹⁾ jumlah debitur yang disajikan secara kumulatif

²⁾ Plafon Penjaminan

2. Alasan/pertimbangan dan strategi

a. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penjaminan baik berdasarkan ukuran usaha, penugasan dan nonpenugasan pemerintah)

b. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Penjaminan)

C. Rencana Kegiatan Usaha Asuransi

1. Tabel rencana kegiatan usaha Asuransi

Jenis Asuransi ¹⁾	Jumlah Tertanggung ²⁾	Aktual Sept X-1 ³⁾	Proyeksi ³⁾				
			Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des x
a. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor							
- ...							
- dst.							
b. Asuransi risiko atas kegagalan bayar							
- ...							
- dst.							
c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri							
- ...							
- dst.							
d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.							
- ...							
- dst.							
Jumlah Total							

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan

X tahun pertama posisi Rencana Bisnis

1) jenis asuransi disajikan sesuai dengan dominasi risiko yang dipertanggungkan, dapat dibuat detail per jenis produk

2) jumlah tertanggung yang disajikan secara kumulatif

3) nilai pertanggungan

2. Alasan/pertimbangan dan strategi

a. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan usaha asuransi baik berdasarkan ukuran usaha, penugasan dan nonpenugasan pemerintah)

b. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana kegiatan usaha asuransi)

D. Tabel Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

Jenis Kegiatan	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
a. Kegiatan usaha pembiayaan						
1. Akad ...						
2. dst.						
b. Kegiatan usaha penjaminan						
1. Akad ...						
2. dst.						
c. Kegiatan usaha asuransi						
1. Akad ...						
2. dst.						
Jumlah Total						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan

X tahun pertama posisi Rencana Bisnis

3. Alasan/pertimbangan dan strategi

c. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah baik berdasarkan ukuran usaha, penugasan, dan nonpenugasan pemerintah)

d. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)

Format 5 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

1. Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

a. Tabel rencana produk dan aktivitas baru*)

No.	Jenis Produk/ Kegiatan Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha **)	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha **)	Tujuan Kegiatan Usaha **)		Plafon	Jumlah Debitur/ Nasabah	Pendapatan	Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis LPEI**)
				Bagi LPEI	Bagi Terjamin/De bitur/ Nasabah				

Keterangan:

*) termasuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

***) penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru)

2. Rencana Pengembangan Pelayanan

a. Tabel rencana pengembangan pelayanan

No.	Jenis Layanan *)	Deskripsi Umum *)	Waktu Pelaksanaan	Tujuan Layanan *)		Keterkaitan Layanan dengan Strategi Bisnis LPEI*)
				Bagi LPEI	Bagi Mitra	

Keterangan:

*) penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan pelayanan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan pelayanan)

Format 6 : Rencana Permodalan

1. Rencana Permodalan

a. Tabel proyeksi permodalan

Keterangan	Aktual ¹⁾ Sept X-1	Proyeksi ¹⁾				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
Modal disetor awal						
Rencana penambahan modal baru						
Total modal disetor						
Laba ditahan ¹⁾						
Total ekuitas						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun pertama posisi Rencana Bisnis.

¹⁾ nilai nominal yang dicantumkan adalah nilai nominal akumulasi.

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana permodalan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana permodalan)

Format 7 : Rencana Pendanaan

1. Rencana Pendanaan berdasarkan Sumber Pendanaan *)

a. Tabel rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:						
1. Penerbitan surat berharga						
2. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari						
a. pemerintah asing						
b. lembaga multilateral						
c. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau						
d. Pemerintah;						
3. Hibah.						
4. lainnya (sebutkan)						
Total Penerimaan Pendanaan Baru						

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
B. Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):						
1. Penerbitan surat berharga						
2. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari						
a. pemerintah asing						
b. lembaga multilateral						
c. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau						
d. Pemerintah;						
3. Hibah.						
4. lainnya (sebutkan)						
Total Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>)						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun pertama posisi Rencana Bisnis.

*) pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah dapat diuraikan dalam paragraf tersendiri

b. Alasan/ pertimbangan dan strategi

1) Alasan/ pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan)

2) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan)

2. Rencana Pendanaan berdasarkan Mata Uang

a. Tabel rencana pendanaan berdasarkan mata uang

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sep X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:						
1. Rupiah						
2. Dolar Amerika Serikat ¹⁾						
3. Mata uang lainnya ¹⁾						
Total penerimaan pendanaan baru ¹⁾						
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):						
1. Rupiah						
2. Dolar Amerika Serikat ¹⁾						
3. Mata uang lainnya ¹⁾						
Total saldo penerimaan pendanaan (<i>outstanding</i>) ¹⁾						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

¹⁾ dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI.

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan mata uang)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan mata uang)

Format 8 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

1. Tabel rencana pengembangan atau perubahan jaringan kantor

Jenis Kantor	Waktu Pelaksanaan ¹⁾	Perkiraan Investasi/ Biaya	Lokasi ²⁾	Keterangan ³⁾
PEMBUKAAN				
1. Kantor Wilayah 2. Kantor Pemasaran				
PERUBAHAN ALAMAT KANTOR				
1. Kantor Pusat 2. Kantor Wilayah 3. Kantor Pemasaran				
PENUTUPAN KANTOR CABANG				
1. Kantor Wilayah 2. Kantor Pemasaran				

Keterangan

- 1) diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
- 2) untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
- 3) keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

2. Alasan/pertimbangan

<p>(diisi dengan alasan/pertimbangan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor)</p>

3. Strategi

<p>(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor)</p>

Format 9 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

1. Rencana Pengembangan Organisasi

a. Uraian mengenai rencana pengembangan organisasi

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite atau lainnya yang memengaruhi struktur organisasi)

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi)

2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Rencana pemenuhan sumber daya manusia

1) Uraian mengenai rencana pemenuhan sumber daya manusia

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat, dan penggunaan tenaga kontrak)

2) Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia)

b. Rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

1) Tabel rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

No.	Materi Diklat ¹⁾	Perkiraan Waktu Diklat ²⁾	Tempat	Biaya Diklat

Keterangan:

1) misal: manajemen risiko, *marketing*, dan lain-lain.

2) diisi dengan bulan pelaksanaan *training*, misal: bulan April 2021.

2) Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)

c. Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar

1) Uraian rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar

(diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan/atau pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko LPEI. Selain itu perlu diisi informasi mengenai perkiraan biaya pengembangan teknologi informasi)

2) Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

Format 10 : Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan

1. Asumsi makro dan mikro yang digunakan

a. Tabel asumsi

Keterangan	Aktual Sep X-1 ¹⁾	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
Asumsi makro:						
1. Pertumbuhan PDB (%)						
2. Inflasi (%)						
3. Lainnya, dirinci per jenis asumsi ²⁾						
Asumsi Mikro: ³⁾						
1.						
2.						
3. dst.						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan

X tahun pertama posisi rencana bisnis

¹⁾ dalam hal tidak tersedia asumsi per triwulan, dapat menggunakan asumsi per tahun.

²⁾ asumsi makro lainnya, seperti nilai tukar, pertumbuhan ekspor, dll.

³⁾ sesuai dengan asumsi yang relevan diterapkan di LPEI (jika ada)

b. Dasar pertimbangan penetapan asumsi mikro meliputi pertumbuhan pembiayaan, penjaminan dll.

(diuraikan berdasarkan pertimbangan dalam menentukan pertumbuhan)

2. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

a. Tabel laporan posisi keuangan

Pos-pos	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
ASET						
1. Kas dan setara kas						
2. Investasi						
3. Piutang pembiayaan ekspor nasional						
4. Aset tetap						
5. Aset pajak tangguhan						
6. Aset lainnya						
Jumlah aset						
LIABILITAS						
1. Utang klaim						

Pos-pos	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
2. Utang pajak						
3. Cadangan klaim						
4. Utang penjaminan ulang						
5. Pendapatan ditangguhkan						
6. Surat berharga yang diterbitkan						
7. Liabilitas lainnya						
Jumlah liabilitas						
EKUITAS						
1. Modal						
2. Cadangan umum						
3. Cadangan klaim						
4. Saldo laba						
Jumlah Ekuitas						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

3. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif
a. Tabel Laba/Rugi Komprehensif

Pos-Pos	Aktual Sep X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
PENDAPATAN						
1. Pendapatan operasional						
2. Pendapatan usaha lainnya						
Total Pendapatan						
BEBAN						
Beban Operasional						
1. Beban bunga dan provisi						
2. Beban tenaga kerja						
3. Beban pemasaran						
4. Beban administrasi dan umum						
5. Beban penyusutan dan amortisasi						
6. Beban penyisihan piutang						
Total Beban						

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK						
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN						
1. Pajak tahun berjalan -/-						
2. Pendapatan (beban) pajak tangguhan						
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK						
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA						
1. Keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap						
2. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing						
3. Keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual						
4. Keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan						

lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas						
5. Keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan						
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

4. Proyeksi Laporan Arus Kas

Pos-pos	Aktual Sept X-1	Proyeksi			Sept X	Des X
		Des X-1	Maret X	Juni X		
1. Arus kas dari kegiatan operasional						
2. Arus kas dari kegiatan investasi						
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan						
4. Kenaikan/penurunan kas						
Saldo kas awal						
Saldo kas akhir						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

5. Rekening Administratif

Keterangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
I. Tagihan Komitmen						
II. Kewajiban Komitmen						
III. Tagihan Kontingensi						
1. Penjaminan yang diterima						
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian						
3. Lainnya						
IV. Kewajiban Kontingensi						
1. Penjaminan yang diberikan						
2. Asuransi yang diberikan						
3. Lainnya						
V. Lainnya						
1. Aset produktif yang dihapusbukukan						
2. Aset produktif yang dihapustagih						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

Format 11 : Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu

Rasio dan Pos Tertentu	Aktual	Proyeksi				
	Sept X-1	Des X-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
1. CAR						
2. NPF Gross						
3. NPF Netto						
4. ROA						
5. ROE						
6. NIM						
7. BOPO						
8. <i>Financing to asset ratio</i>						
9. <i>Gearing Ratio</i>						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

Format 12 : Rencana Penghapusbukuan Piutang

- a. Uraian rencana penghapusbukuan piutang

(diisi dengan total realisasi penghapusbukuan piutang tahun sebelumnya dan rencana penghapusbukuan piutang tahun berikutnya)

- b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penghapusbukuan piutang)

- c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penghapusbukuan piutang)

Format 13 : Rencana Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI

1. Rencana penugasan

(diisi dengan sumber dana penugasan khusus, rencana penggunaan dana, tujuan penugasan khusus, manfaat penugasan khusus dan proyeksi keuangan)

2. Alasan /pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan rencana penugasan khusus pemerintah)

3. Strategi

(diisi dengan strategi rencana penugasan khusus pemerintah)

Format 14 : Rencana Penempatan Dana

1. Rencana Penempatan Dana

Jenis Penempatan	Aktual Sep X-1	Proyeksi				
		DesX-1	Maret X	Juni X	Sept X	Des X
I. Pada Bank						
II. Pada Surat Berharga						
a. Pemerintah						
b. Bank Indonesia						
c. lembaga keuangan multilateral						
d. lainnya						
Total						

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi Rencana Bisnis.

2. Alasan /pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan rencana penempatan dana)

3. Strategi

(diisi dengan strategi rencana penempatan dana)

Format 15 : Penerapan Manajemen Risiko

(diisi dengan faktor-faktor risiko, proses manajemen risiko, profil risiko dan penerapan tata kelola yang baik dalam penerapan manajemen risiko yang mencakup pemenuhan modal minimum, pengawasan aktif dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat)

Format 16 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis

1. diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
 - a. realisasi atas rencana kegiatan usaha Sebagaimana dimaksud dalam format 4;
 - b. realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 5;
 - c. realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka dalam format 6;
 - d. realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka dalam format 7;
 - e. realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka dalam format 8;
 - f. realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam format 9; dan
 - g. realisasi atas proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 10.
2. diisi penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis terkait dengan cakupan realisasi pada angka 1, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
3. diisi dengan tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
4. diisi dengan rasio dan pos tertentu meliputi penjelasan mengenai realisasi atas rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam format 11.
5. diisi penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
 - a. rencana penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud dalam format 12;
 - b. rencana penugasan khusus dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam format 13;
 - c. rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam format 14; dan
 - d. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam format 15.

Disetujui oleh:

Direktur Eksekutif

(tanda tangan dan nama terang)

Format 17 : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

(diisi dengan penilaian Dewan Direktur tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, faktor yang memengaruhi kinerja LPEI, serta upaya untuk memperbaiki kinerja, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja LPEI terdapat penurunan kinerja)	
Disetujui oleh:	
Dewan Direktur:	(ttd dan nama terang)
Dewan Direktur:	(ttd dan nama terang)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Legislasi dan Informasi Hukum
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Rifki Ramadansyah